

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
DANA ALOKASI UMUM KABUPATEN / KOTA DI
SUMATERA BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S1) pada Program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*



Oleh :

RENA AMALIN
2008 / 05963

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2014**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DANA ALOKASI UMUM
KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA BARAT

NAMA : RENA AMALIN
BP / NIM : 2008 / 05963
KEAHLIAN : PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PRODI : EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS : EKONOMI

Padang, Juni 2014

Disetujui oleh :

Pembimbing I



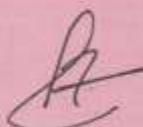
Drs. Zul Azhar, M.Si
NIP : 19590805 198503 1 006

Pembimbing II



Novya Zulva Riani, SE. M.Si
NIP : 19711104 200501 2 001

Mengetahui
Ketua Prodi Ekonomi Pembangunan



Drs. Alianis, M.S
NIP : 19591129 198602 1 001

Halaman Pengesahan Lulus Ujian Skripsi

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ekonomi Pembangunan
Universitas Negeri Padang*

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
DANA ALOKASI UMUM KABUPATEN/KOTA DI
SUMATERA BARAT**

Nama : Rena Amalin
TM/NIM : 2008 / 05963
Keahlian : Perencanaan Pembangunan
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Fakultas : Ekonomi

Padang, Juni 2014

Tim Penguji

No. Jabatan	Nama
1. Ketua	: Drs. Zul Azhar, M.Si
2. Sekretaris	: Novya Zulva Riani, SE, M.Si
3. Anggota	: Dr. Hasdi Aimon, M.Si
4. Anggota	: Ariusni SE, M.Si

Tanda Tangan



1
2
3
4

SURAT PERNYATAAN

(Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana S1)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rena Amalin
NIM/BP : 05963/2008
Tempat/ Tgl Lahir : Jambi, 23 Oktober 1990
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Keahlian : Perencanaan Pembangunan
Fakultas : Ekonomi
Alamat :
No. HP/Telp. : 085266030923
Judul Skripsi : Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat.

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis (skripsi) saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademi (sarjana), baik di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penilaian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Padang,
Yang menyatakan



Rena Amalin
NIM. 05963

ABSTRAK

Rena Amalin, (2008/05963) : Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat. Skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Di bawah bimbingan Bapak Drs. Zul Azhar, M.Si dan Ibu Novya Zulva Riani, SE, M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) Pengaruh rasio beban ketergantungan penduduk terhadap dana alokasi umum Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat, (2) Pengaruh indeks pembangunan manusia Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat, (3) Pengaruh rasio belanja pegawai terhadap dana alokasi umum Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat, (4) Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap dana alokasi umum Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat, (5) Pengaruh rasio beban ketergantungan penduduk, indeks pembangunan manusia, rasio belanja pegawai, pendapatan asli daerah secara bersama-sama terhadap dana alokasi umum Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat.

Penelitian ini menggunakan data panel yaitu gabungan antara data *time series* tahun 2008-2012 dan *cross-section* 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan induktif. Analisis induktif dalam penelitian ini mencakup (1) Uji Multikolinearitas. (2) Uji Heterokedastisitas. (3) Uji Autokorelasi (4) Analisis Regresi Panel. (5) Uji T. (6) Uji F.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Rasio beban ketergantungan penduduk berpengaruh signifikan dan negatif terhadap dana alokasi umum Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat ($\text{sig}=0,04 < \alpha=0,05$) dengan tingkat pengaruh sebesar 0,04 persen. (2) Indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan dan positif terhadap dana alokasi umum Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat ($\text{sig}=0,00 < \alpha=0,05$) dengan tingkat pengaruh sebesar 0,00 persen. (3) Rasio belanja pegawai tidak berpengaruh signifikan terhadap dana alokasi umum Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat ($\text{sig}=0,05 > \alpha=0,05$) dengan tingkat pengaruh sebesar 0,05 persen. (4) Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap dana alokasi umum Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat ($\text{sig}=0,19 < \alpha=0,05$) dengan tingkat pengaruh sebesar 0,19. (6) Rasio penduduk produktif, IPM, rasio belanja pegawai terhadap belanja daerah, PAD berpengaruh signifikan terhadap dana alokasi umum Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat ($\text{sig}=0,00 < \alpha=0,05$). Kontribusi secara bersama-sama dari variabel independent yang digunakan terhadap variabel dependent adalah sebesar 96,59 persen dan sisanya 7,08% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model atau tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat maka disarankan kepada Pemerintah setiap Kabupaten/Kota untuk lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilakukan berkaitan dengan formula dana alokasi umum agar memperhatikan kembali variabel-variabel yang dapat mempengaruhi DAU tersebut.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat”*. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs. Zul Azhar, M.Si dan Ibu Novya Zulva Riani, SE, M.Si, selaku pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan, saran dan waktu kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. Zul Azhar, M.Si, sebagai pembimbing I dan Ibu Novya Zulva Riani, SE, M.Si, sebagai pembimbing II serta Bapak Dr. Hasdi Aimon, M.Si dan Ibu Ariusni, SE, M.Si selaku Tim Penguji Skripsi yang telah memberikan saran – saran beserta masukan untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Yunia Wardi, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan fasilitas kuliah dan izin dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Ali Anis, M.S selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan, dan Ibu Novya Zulva Riani, SE, M.Si, selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk melakukan penelitian sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi.
4. Bapak dan Ibu staf pengajar serta staf pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan bantuan pengetahuan dan proses administrasi yang bermanfaat selama masa perkuliahan.

5. Kepala Badan Pusat Statistik Sumatera Barat beserta staf dan karyawan yang telah membantu dalam proses pengambilan data skripsi.
6. Dan teristimewa penulis persembahkan kepada ibunda dan ayahanda tercinta serta adik dan anggota keluarga yang telah memberikan do'a dan motivasi yang tak pernah henti-hentinya, demi terealisasinya cita-cita penulis dalam menyelesaikan studi ini dengan cepat.
7. Teman Teman se-angkatan 2008 Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Hanya kepada Allah SWT penulis memohon semoga jasa baik yang telah diberikan dibalas oleh Allah dengan pahala yang setimpal, Amin.....

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak luput dari segala kekurangan, untuk itu saran dan kritikan yang sifatnya membangun dari pembaca sangat diharapkan. Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih.

Padang, April 2014

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	17
C. Tujuan Penelitian.....	18
D. Manfaat Penelitian.....	18
BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	
A. Kajian Teori	
1. Konsep Intergovernmental Grants.....	20
2. Dana Alokasi Umum.....	22
3. Pengaruh Rasio Beban Ketergantungan Hidup Terhadap Dana Alokasi Umum.....	29
4. Pengaruh IPM Terhadap Dana Alokasi Umum.....	31
5. Pengaruh Rasio Belanja Pegawai Terhadap Dana Alokasi Umum.....	33
6. Pengaruh PAD Terhadap Dana Alokasi Umum.....	34
B. Penelitian Relevan.....	35
C. Kerangka Konseptual.....	38
D. Hipotesis Penelitian.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	42

C. Jenis dan Sumber Data.....	42
D. Variabel Penelitian.....	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	43
F. Definisi Operasional.....	44
G. Teknik dan Analisis Data.....	46
1. Analisis Deskriptif.....	46
2. Analisis Induktif.....	46
a. Uji Prasyarat Analisis.....	46
b. Analisis Model Regresi Panel.....	49
c. Koefisien Determinan.....	54
d. Uji Hipotesis.....	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.....	58
1. Gambaran Umum Daerah Penelitian.....	58
a. Letak Geografis Sumatera Barat.....	58
b. Iklim.....	59
c. Penduduk.....	59
2. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian.....	61
a. Deskripsi Dana Alokasi Umum Kab/Kota Di Sumatera Barat.....	61
b. Perkembangan Rasio Beban Ketergantungan Hidup Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat.....	63
c. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat.....	66
d. Perkembangan Rasio Belanja Pegawai Kab/Kota Di Sumatera Barat.....	69
e. Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat.....	71
3. Analisis Induktif (Inferensial)	
a. Uji Asumsi Klasik.....	73
1) Uji Multikolinearitas.....	74

2) Uji Heterokedastisitas.....	75
3) Uji Autokorelasi.....	76
b. Analisis Model Regresi Panel.....	77
1) Uji Chow.....	77
2) Uji Hausman.....	78
3) Analisis Model Regresi Panel.....	79
c. Koefisien Determinasi (R^2).....	83
d. Pengujian Hipotesis.....	83
1) Uji T.....	83
2) Uji F.....	86
B. Pembahasan.....	86
1) Pengaruh Rasio Beban Ketergantungan Hidup Terhadap Dana Alokasi Umum Kab/Kota Di Sumatera Barat.....	87
2) Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Dana Alokasi Umum.....	89
3) Pengaruh Rasio Belanja Pegawai Terhadap Dana Alokasi Umum.....	91
4) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Dana Alokasi Umum.....	93
5) Pengaruh Rasio Beban Ketergantungan Hidup, Indeks Pembangunan Manusia, Rasio Belanja Pegawai, Pendapatan Asli Daerah Secara Bersama -sama Terhadap Dana Alokasi Umum Kab/Kota Di Sumatera Barat.....	94
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan.....	96
B. Saran.....	97
Daftar Pustaka.....	99
Lampiran.....	101

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Realisasi Dana Alokasi Umum Kab/Kota Di Sumatera Barat Tahun 2008-2012.....	7
2. Rasio Beban Ketergantungan Hidup Kab/Kota Di Sumatera Barat Tahun 2008 2012.....	9
3. IPM Kab/Kota Di Sumatera Barat Tahun 2008-2012.....	11
4. Realisasi Rasio Belanja Pegawai Tahun 2008-2012.....	14
5. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kab/Kota Di Sumatera Barat Tahun 2008-2012.....	16
6. Luas Daerah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kab/Kota Sumatera Barat Tahun 2012.....	60
7. Perkembangan Dana Alokasi Umum Kab/Kota Di Sumatera Barat Tahun 2008-2012.....	62
8. Perkembangan Beban Ketergantungan Hidup Kab/Kota Di Sumatera Barat Tahun 2008 2012.....	63
9. Perkembangan IPM Kab/Kota Di Sumatera Barat Tahun 2008-2012.....	66
10. Perkembangan Rasio Belanja Pegawai Tahun 2008-2012.....	69
11. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kab/Kota Di Sumatera Barat Tahun 2008-2012.....	71
12. Hasil Uji Multikolinearitas.....	74
13. Hasil Uji Heterokedastisitas.....	75
14. Hasil Uji Autokorelasi.....	76
15. Uji Chow.....	77
16. Uji Hausman.....	78
17. Analisis Model Regresi Panel.....	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual.....	40
2. Uji Durbin Watson.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara dari sekian banyak negara yang merupakan negara kesatuan. Dalam hal ini, penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Oleh karena itu, dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, adanya pemerintah daerah adalah ciptaan dari pemerintah pusat melalui Undang-undang. Sepenuhnya kedaulatan hanya berada di tangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah hanya menjadi subordinasi pemerintah pusat.

Pada dasarnya, seiring dengan cita-cita demokrasi nasional dan proses percepatan pembangunan maka muncul suatu yang dinamakan dengan otonomi daerah. Ini berarti bahwa suatu daerah itu memiliki sifat yang otonom. Menurut *Encyclopedia of Social Science*, otonomi adalah “*the legal self sufficiency of social body and it’s actual independence.*” Lebih jauh, berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi, otonomi dapat diartikan sebagai hak untuk mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah. Tentunya, otonomi diberikan sebagai upaya percepatan

pembangunan dan peningkatan pelayanan sesuai tuntutan dan prakarsa masyarakat di daerah bersangkutan. Otonomi sebenarnya mengandung nilai-nilai kepercayaan yang dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat daerah, sehingga akan meredam potensi terjadinya disintegrasi bangsa.

Hal ini menjadi semakin logis dengan diberikannya otonomi pada daerah karena akan sangat sulit mengurus seluruh kepentingan negara yang banyak dan luas ini jika hanya dikerjakan secara terpusat. Oleh karena itu, dalam menjalankan pemerintahannya, utamanya hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, Indonesia menganut asas desentralisasi, yang di samping itu terdapat pula asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Desentralisasi berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (*NKRI*). Dengan demikian, hal ini berarti semua urusan, tugas, dan wewenang pelaksanaan pemerintahan diserahkan sepenuhnya kepada daerah.

Dengan terselenggaranya otonomi seluas-luasnya maka diperlukan suatu pengaturan secara adil dan selaras mengenai hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan perlu diatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang merupakan subsistem

keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas atau sejalan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pendanaan atas penyerahan urusan kepada pemerintahan daerah menganut prinsip *money follow function*, yang bermakna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Dana perimbangan terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Di samping dana perimbangan tersebut, pemerintah daerah mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan lain-lain pendapatan. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. Pendapatan dalam negeri neto adalah penerimaan negara yang berasal dari pajak dan bukan pajak setelah dikurangi dengan penerimaan negara yang dibagi hasilkan kepada daerah. Jumlah DAU 26% ini merupakan jumlah DAU untuk seluruh propinsi dan Kabupaten/Kota.

Menurut penelitian Fajrillah (Tahun 2006) faktor yang dapat menjelaskan DAU atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar (jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah). Celah fiskal sebagaimana dimaksud adalah kebutuhan fiskal (kebutuhan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum), setiap kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud diukur secara berturut-turut dengan rasio beban ketergantungan hidup, dan Indeks Pembangunan Manusia dikurangi dengan kapasitas fiskal yaitu sumber

pendanaan daerah yang berasal dari PAD dan Dana Bagi Hasil (DBH). Rasio beban ketergantungan hidup adalah rasio perbandingan antara jumlah penduduk produktif dengan jumlah penduduk non produktif. Semakin tingginya persentase rasio beban ketergantungan hidup menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Indeks pembangunan manusia merupakan salah satu cara untuk mengukur taraf kualitas fisik dan non fisik penduduk. Kualitas fisik tercermin dari angka harapan hidup, sedangkan kualitas non fisik (intelektualitas) melalui lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek huruf; dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat yang tercermin dari nilai Purchasing Power Parity Index (PPPI). Rasio belanja pegawai adalah rasio ini mengukur seberapa besar daerah mengalokasikan Belanja Pegawai Tidak Langsung terhadap total belanjanya. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen dari APBD untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya (BPS Sumatera Barat).

Salah satu masalah dalam otonomi daerah adalah adanya kesenjangan fiskal antar daerah. Pemerintah dalam perkembangannya memberikan Dana Perimbangan untuk mengatasi masalah kesenjangan fiskal. Menurut penelitian Hendrik dan Nurdin (Tahun 2008) mengatakan ketimpangan pendapatan masyarakat meningkat disebabkan akibat

hubungan fiskal antara pusat dan daerah masih menempatkan pembiayaan pembangunan daerah dalam posisi tergantung dengan subsidi dari pusat. Daerah yang miskin sumber daya alam (SDA) umumnya menggantungkan pada Dana Alokasi Umum (DAU). Beberapa studi menunjukkan dana bagi hasil SDA dan DAU semakin memperlebar kesenjangan antar daerah di Indonesia. Meski sudah memasuki era otonomi daerah, tetapi kemandirian daerah juga tidak terwujud, yang ada melainkan ketergantungan terhadap pemerintah pusat. PAD diharapkan dapat meningkatkan keuangan daerah (BPS Sumatera Barat).

Hampir semua Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia memiliki ketimpangan fiskal (*fiscal gap*). Sumatera Barat memiliki 12 Kabupaten dan 7 Kota yang juga memiliki masalah ketimpangan fiskal dalam sumber pendanaan dalam PAD pada beberapa Kabupaten dan Kota. Fenomena Peningkatan pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Sumatera Barat melalui pengawasan atas penyaluran dan penerimaan Dana Perimbangan secara internal dikontrol lebih baik, peningkatan koordinasi antara Kepala BPKD Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Pusat, dan pelaksanaan keuangan publik oleh para pengelola keuangan (Pemda) harus transparan dan bertanggung jawab kepada publik. Sumber dana bagi daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain yang sah. Tiga sumber pertama langsung dikelola oleh pemerintah daerah melalui APBD, sedangkan yang lain dikelola oleh pemerintah pusat melalui kerja sama dengan pemerintah daerah.

DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Hal ini menjadi fenomena menarik untuk diteliti mengingat transfer dari pemerintah pusat sangat besar terhadap Sumatera Barat.

Pada tabel 1 di bawah ini dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi DAU Kabupaten/Kota di Sumatera Barat secara keseluruhan dari tahun 2008-2012 adalah sebesar Rp 353.363,80. Kota Padang memiliki rata-rata Realisasi tertinggi sebesar Rp 693.704,77 dengan realisasi tertinggi pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp 871.875,67. Hal ini disebabkan kemungkinan karena Sebagai ibukota dari Sumatera Barat, Padang memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang proses pertumbuhan ekonomi. Rata-rata realisasi terendah adalah Kota Sawahlunto dengan rata-rata sebesar Rp 214.822,49.

Berdasarkan tabel 1 di bawah ini, dan hampir semua Kabupaten/Kota di Sumatera Barat mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini kemungkinan disebabkan karena transfer dana dari Pemerintah pusat ke Pemerintah daerah sangat besar, besarnya transfer dana DAU kepada pemerintah Provinsi maupun Kabupaten dan Kota adalah karena untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya agar proses pelaksanaan pembangunan lebih merata dan memberikan dampak yang lebih besar terhadap perekonomian daerah.

Berikut disajikan data Realisasi dan Perkembangan Dana Alokasi

Umum Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat :

Tabel 1
Realisasi Dana Alokasi Umum
Kabupaten/Kota di Sumatera Barat
Tahun 2008-2012 (dalam juta rupiah)

Kab/Kota	DAU					Rata-rata Perkembangan
	2008	2009	2010	2011	2012	
Kab.Kep.Mentawai	273.300,16	276.648,81	290.918,55	322.850,02	371.174,68	306.978,44
Kab.Pesisir Selatan	424.760,86	448.604,30	454.097,27	514.113,57	609.139,24	490.143,05
Kab.Solok	365.383,07	368.844,81	415.421,03	481.015,45	521.759,48	430.484,77
Kab.Sijunjung	273.785,92	279.405,72	291.098,17	331.390,87	389.425,71	313.021,28
Kab.Tanah Datar	373.848,94	379.899,21	390.379,99	432.459,18	520.092,33	419.335,93
Kab.Pdg Pariaman	407.306,20	417.424,87	417.865,29	464.407,37	558.234,58	453.047,66
Kab.Agam	414.880,75	418.752,29	435.507,28	490.177,29	595.713,05	471.006,13
Kab.50 Kota	385.019,22	391.553,31	411.513,04	466.795,84	550.759,74	441.128,23
Kab.Pasaman	297.522,37	318.683,50	323.271,51	361.794,55	426.264,65	345.507,32
Kab.Solok Selatan	213.109,22	221.532,00	245.504,06	264.086,20	315.024,65	251.851,11
Kab.Dharmasraya	27.157,82	256.120,43	266.175,62	297.587,68	351.295,62	239.667,43
Kab.Pasaman Barat	305.576,07	323.123,27	350.371,15	437.992,67	457.694,68	374.951,57
Kota Padang	624.642,09	628.472,61	632.117,45	711.416,05	871.875,67	693.704,77
Kota Solok	205.820,70	205.832,37	210.134,68	237.102,08	280.495,63	227.877,09
Kota Sawahlunto	187.631,26	190.325,97	202.073,97	225.119,75	268.961,52	214.822,49
Kota Pdg Panjang	192.699,29	194.866,98	194.866,44	239.694,89	269.610,49	218.347,62
Kota Bukittinggi	236.403,81	236.106,15	242.306,44	272.853,71	326.224,31	262.778,88
Kota Payakumbuh	234.690,66	237.487,54	246.791,25	260.148,61	325.023,25	260.998,18
Kota Pariaman	223.192,12	222.473,79	236.689,03	262.870,14	299.255,37	245.402,58
Rata-rata	298.248,98	316.639,89	329.321,17	385.344,54	437.264,43	353.363,80

Sumber : BPS, Statistik Keuangan Pemerintah Kab/Kota di Sumbar data diolah 2013

Disaat alokasi DAU yang diperoleh besar, maka Pemerintah Daerah akan berusaha agar pada periode berikutnya DAU yang diperoleh tetap. Menurut Adi (2006) proporsi DAU terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibanding dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk PAD (Ndadari, L.W, 2008). Transfer dari Pemerintah Pusat merupakan sumber pendanaan utama Pemda untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari di perhitungan APBD. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar

pelayanan publik minimum di seluruh negeri. Hal ini seperti disebutkan oleh Simanjuntak dalam Sidik et al, 2002.

Dilihat dari jumlah penduduk Indonesia yang besar diharapkan mampu membantu pelaksanaan proses pembangunan dan otonomi daerah. Terutama penduduk yang berusia produktif, diharapkan mampu menambah sumber daya manusia yang berkualitas. Tercapainya DAU untuk pemerataan kemampuan keuangan juga didukung rasio beban ketergantungan hidup sebagai salah satu komponen DAU yang dapat meningkatkan DAU.

Pada Tabel 2 di bawah, menggambarkan rasio beban ketergantungan hidup Kabupaten/Kota Sumatera Barat mengalami fluktuasi setiap tahunnya dengan rata-rata sebesar 62,69%. Hal ini kemungkinan terjadi karena tingginya tingkat kelahiran di tiap Kabupaten dan Kota tersebut, serta tidak meratanya jumlah penduduk usia produktif dan non produktif. Sedangkan rata-rata dengan rasio beban ketergantungan hidup tertinggi adalah Kabupaten Agam dengan rata-rata sebesar 96,75%. Daerah yang memiliki rata-rata rasio beban ketergantungan hidup terendah adalah Kota Padang. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat tabel rasio beban ketergantungan hidup Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tahun 2008-2012 :

Tabel 2
Perkembangan Rasio Beban Ketergantungan Hidup Kab/Kota Di Sumatera Barat Tahun 2008-2012

Kab/Kota	Rasio Ketergantungan					Rata-rata
	2008	2009	2010	2011	2012	
Kab.Kep.Mentawai	66,16	63,59	69,09	67,83	56,79	64,69
Kab.Pesisir Selatan	165,70	63,31	68,41	59,23	64,93	84,32
Kab.Solok	63,72	64,38	64,21	64,17	43,83	60,06
Kab.Sijunjung	60,73	60,75	62,39	60,78	57,28	60,39
Kab.Tanah Datar	55,83	55,85	63,43	63,27	48,65	57,40
Kab.Pdg Pariaman	84,09	76,68	70,21	70,19	57,26	71,69
Kab.Agam	79,76	35,57	150,42	151,57	66,45	96,75
Kab.50 Kota	58,64	58,62	63,77	64,04	57,27	60,47
Kab.Pasaman	69,75	67,09	67,26	62,51	67,36	66,79
Kab.Solok Selatan	60,35	58,33	62,27	62,27	57,28	60,09
Kab.Dharmasraya	40,35	57,11	53,62	55,52	57,29	52,78
Kab.Pasaman Barat	69,19	66,27	65,48	63,51	53,10	63,51
Kota Padang	43,50	47,26	46,06	49,04	45,79	46,33
Kota Solok	44,16	61,14	54,88	61,49	57,27	55,79
Kota Sawahlunto	59,23	59,18	58,24	57,91	58,04	58,52
Kota Pdg Panjang	58,51	58,52	59,41	59,42	57,27	58,62
Kota Bukittinggi	54,72	54,74	51,27	45,94	51,24	51,58
Kota Payakumbuh	53,89	59,58	58,56	58,56	57,27	57,57
Kota Pariaman	69,31	64,09	61,58	62,30	61,54	63,76
Rata-rata	66,19	59,58	65,82	65,24	56,63	62,69

Sumber : BPS, Kabupaten/Kota Sumatera Barat dalam angka 2008-2012

Semakin tingginya persentase rasio beban ketergantungan hidup menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase rasio penduduk produktif yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi menurut Maier (Mudrajad Kuncoro: 2004) Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan

dibutuhkan untuk membuat konsumsi dimasa mendatang semakin tinggi. Rendahnya sumberdaya perkapita akan menyebabkan penduduk tumbuh lebih cepat, yang gilirannya membuat investasi dalam “kualitas pembangunan manusia” semakin sulit. Pertumbuhan penduduk yang cepat membuat semakin sulit melakukan perubahan yang dibutuhkan untuk meningkatkan perubahan ekonomi dan sosial. Tingginya tingkat kelahiran merupakan penyumbang utama pertumbuhan kota yang cepat. Bermekarnya kota-kota di NSB membawa masalah-masalah baru dalam menata maupun mempertahankan tingkat kesejahteraan warga.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu cara untuk mengukur taraf kualitas fisik dan non fisik penduduk. Kualitas fisik tercermin dari angka harapan hidup, sedangkan kualitas non fisik (intelektualitas) melalui lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek huruf; dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat yang tercermin dari nilai Purchasing Power Parity Index (PPPI). Dibawah ini disajikan data tentang Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat :

Tabel 3
Perkembangan IPM Kab/Kota Di Sumatera Barat Tahun 2008-2012

Kab/Kota	IPM					Rata-rata
	2008	2009	2010	2011	2012	
Kab.Kep.Mentawai	67,97	68,42	68,75	74,28	69,26	68,69
Kab.Pesisir Selatan	70,07	70,61	71,15	69,06	72,43	71,21
Kab.Solok	69,81	70,41	70,93	71,77	72,15	71,01
Kab.Sijunjung	69,77	70,37	70,92	71,40	71,80	70,85
Kab.Tanah Datar	72,98	73,54	74,00	74,58	75,00	74,02
Kab.Pdg Pariaman	70,63	71,15	71,45	71,98	72,53	71,55
Kab.Agam	72,50	72,90	73,28	73,74	74,11	73,31
Kab.50 Kota	70,47	70,80	71,22	71,78	72,24	71,30
Kab.Pasaman	71,71	72,32	72,71	73,19	73,78	72,74
Kab.Solok Selatan	68,06	68,67	68,98	69,34	69,69	68,95
Kab.Dharmasraya	67,99	68,60	69,13	69,89	70,25	69,17
Kab.Pasaman Barat	69,33	69,87	70,18	70,62	71,07	70,21
Kota Padang	77,20	77,43	77,81	78,15	78,55	77,83
Kota Solok	74,73	75,23	75,65	76,04	76,54	75,64
Kota Sawahlunto	74,29	74,71	74,96	75,41	75,87	75,05
Kota Pdg Panjang	76,93	77,16	77,45	78,12	78,51	77,63
Kota Bukittinggi	77,59	77,86	78,26	78,73	79,07	78,30
Kota Payakumbuh	74,95	75,37	75,81	76,29	76,76	75,84
Kota Pariaman	73,43	74,05	74,46	74,89	75,23	74,41
Rata-rata	72,13	72,60	73,01	73,51	73,94	73,04

Sumber : BPS, Sumatera Barat Dalam Angka 2008-2012

Dari tabel 3 diatas memperlihatkan bahwa perkembangan IPM di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dari tahun 2008-2012 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kota Bukittinggi mengalami rata-rata IPM tertinggi dengan rata-rata 78,30%. Ini disebabkan upaya keras pemerintah Kota Bukittinggi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan rata-rata perkembangan IPM terendah diantara Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yaitu sebesar 68,69%. Kabupaten Kepulauan Mentawai masih perlu kerja keras untuk meningkatkan IPM nya dan kualitas pendidikan di daerah ini masih rendah, karena setiap tahun IPM nya termasuk yang paling rendah di wilayah

Sumatera Barat. Minimnya sumber daya manusia yang berkualitas serta keterbatasan infrastruktur yang menyebabkan indeks pembangunan manusia di daerah ini mengalami kemunduran.

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata tingkat perkembangan IPM di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat relatif meningkat setiap tahunnya. Dengan semakin meningkatnya IPM, maka akan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya juga. Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu indikator dalam mencapai pembangunan ekonomi dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan meminimalisasi dari kemiskinan. Menurut Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa dalam era otonomi, pemerintah daerah harus semakin mendekatkan diri pada berbagai pelayanan dasar masyarakat. Oleh karena itu program dan kegiatan-kegiatan pemerintah diarahkan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerahnya serta kualitas pembangunan manusianya dan meningkatkan belanja daerahnya terutama belanja pegawai.

Belanja Pegawai adalah salah satu komponen dari belanja tidak langsung yaitu pengeluaran pembelanjaan gaji pegawai masing-masing daerah dengan kebutuhan gaji daerah secara nasional untuk meningkatkan taraf hidupnya yang merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan (Permendagri No.13 Tahun 2006). Belanja pegawai diambil karena berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, DAU ternyata masih relatif dominan dengan diperhitungkannya besaran alokasi dasar (AD) sebagai salah satu komponen DAU. AD

merupakan jumlah gaji seluruh pegawai negeri sipil daerah (PNSD) yang terdiri dari gaji pokok ditambah tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan penggajian PNS. Dan dengan adanya rasio belanja pegawai adalah untuk mengetahui proporsi Belanja Pegawai terhadap total Belanja Daerah.

Berdasarkan tabel 4 di bawah ini, dapat dilihat bahwa rata-rata rasio belanja pegawai secara keseluruhan adalah sebesar 0,51%. Rata-rata rasio belanja pegawai di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat cenderung mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Kota Padang memiliki rata-rata tertinggi diantara Kabupaten dan Kota lainnya. Hal ini disebabkan kota Padang adalah sebagai Ibukota di Sumatera Barat yang memiliki banyak Pegawai Negeri Sipil (PNS), gaji dan tunjangan yang diperoleh juga besar dengan rata-rata perkembangan sebesar 0,63%. Sedangkan daerah yang memiliki rata-rata terendah adalah kabupaten kepulauan mentawai dengan rata-rata sebesar 0,27%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel rasio belanja pegawai Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tahun 2008-2012 di bawah ini :

Tabel 4
Rasio Belanja Pegawai Kab/Kota Di Sumatera Barat Tahun
2008-2012

Kab/Kota	Rasio					Rata-rata
	2008	2009	2010	2011	2012	
Kab.Kep.Mentawai	0,09	0,37	0,28	0,32	0,28	0,27
Kab.Pesisir Selatan	0,49	0,56	0,57	0,60	0,64	0,57
Kab.Solok	0,51	0,61	0,68	0,62	0,61	0,61
Kab.Sijunjung	0,40	0,42	0,46	0,49	0,53	0,46
Kab.Tanah Datar	0,46	0,63	0,71	0,66	0,69	0,63
Kab.Pdg Pariaman	0,49	0,55	0,59	0,66	0,64	0,59
Kab.Agam	0,56	0,59	0,70	0,68	0,69	0,65
Kab.50 Kota	0,52	0,57	0,68	0,63	0,63	0,61
Kab.Pasaman	0,48	0,51	0,63	0,56	0,58	0,55
Kab.Solok Selatan	0,36	0,37	0,48	0,45	0,42	0,42
Kab.Dharmasraya	0,35	0,36	0,47	0,46	0,47	0,42
Kab.Pasaman Barat	0,47	0,42	0,52	0,53	0,48	0,48
Kota Padang	0,60	0,60	0,65	0,65	0,64	0,63
Kota Solok	0,38	0,41	0,46	0,47	0,48	0,44
Kota Sawahlunto	0,47	0,52	0,55	0,47	0,49	0,50
Kota Pdg Panjang	0,38	0,39	0,41	0,46	0,49	0,43
Kota Bukittinggi	0,52	0,52	0,58	0,59	0,61	0,56
Kota Payakumbuh	0,47	0,46	0,46	0,59	0,55	0,51
Kota Pariaman	0,40	0,44	0,46	0,46	0,53	0,46
Rata-rata	0,44	0,49	0,54	0,55	0,55	0,51

Sumber : BPS, Statistik Keuangan Pemerintah Kab/Kota Sumatera Barat 2008-2012 (data diolah 2013)

Semakin tinggi angka rasionya maka semakin besar proporsi APBD yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil angka rasio Belanja Pegawai maka semakin kecil proporsi APBD yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai APBD. Jumlah PNS tentu saja sangat berpengaruh pada tingginya belanja pegawai di daerah. Masih banyak PNS yang kinerjanya rendah atau tidak produktif. Pensiun dini bagi PNS yang tidak produktif bisa menjadi salah satu solusi, tentunya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kompensasi yang layak.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah sarana atau alat untuk dalam menjalankan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab serta memberi isi dan arti tanggung jawab Pemerintah Daerah karena APBD menggambarkan seluruh kebijaksanaan Pemerintah Daerah. Di samping dana perimbangan, sumber pendapatan daerah lainnya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan salah satu komponen dari APBD untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya (BPS Sumatera Barat). Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. Dan Pendapatan Asli Daerah ini sekaligus dapat menunjukan tingkat kemandirian suatu daerah. Maka PAD diharapkan dapat menjadi sumber andalan dalam APBD agar tercapai kapasitas fiskal yang lebih baik (Halim, 2004).

Dari tabel 5 di bawah, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan dari tahun 2008-2012 rata-rata tertinggi adalah Kota Padang yaitu sebesar Rp117.116,27. Hal ini disebabkan karena Kota Padang sebagai ibu kota di Sumatera barat yang mempunyai pajak daerah, retribusi daerah dan hasil perusahaan milik daerah yang besar pula ataupun pendapatan asli daerah lain yang sah. Ini menunjukkan bahwa penggalan oleh pemerintah daerah propinsi melalui sumber daya asli daerah dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Rata-rata realisasi terendah adalah Kabupaten Solok Selatan sebesar Rp 15.386,79. Berikut ini disajikan data tentang Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat :

Tabel 5
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat
2008-2012

Kab/Kota	Pendapatan Asli Daerah					Rata-rata
	2008	2009	2010	2011	2012	
Kab.Kep.Mentawai	25.243,86	29.188,12	28.354,29	36.593,73	37.025,26	31.281,05
Kab.Pesisir Selatan	16.377,99	17.514,45	28.354,29	30.280,29	40.254,88	26.556,38
Kab.Solok	18.373,10	19.806,29	17.595,93	28.264,28	26.679,47	22.143,81
Kab.Sijunjung	24.423,79	25.982,27	19.620,32	40.283,36	32.813,11	28.624,57
Kab.Tanah Datar	32.084,22	36.543,15	21.973,85	51.555,49	53.691,05	39.169,55
Kab.Pdg Pariaman	23.813,87	22.880,89	36.941,73	26.610,99	31.293,09	28.308,12
Kab.Agam	24.180,99	25.956,30	24.706,05	37.939,55	41.572,96	30.871,17
Kab.50 Kota	20.738,94	11.307,39	22.952,17	24.039,63	24.936,55	20.794,94
Kab.Pasaman	16.265,57	15.721,24	17.435,27	25.780,77	33.037,27	21.648,02
Kab.Solok Selatan	12.008,34	11.989,38	16.094,17	14.787,38	22.054,66	15.386,79
Kab.Dharmasraya	21.562,52	25.120.058	7.360,81	34.511,85	39.200,74	25.551,20
Kab.Pasaman Barat	19.755,96	23.457,52	25.541,71	28.636,44	32.493,94	25.977,11
Kota Padang	117.728,89	113.318,41	24.205,11	140.878,11	189.450,84	117.116,27
Kota Solok	21.644,89	23.831,13	116.691.28	23.695,90	23.320,51	41.836,74
Kota Sawahlunto	23.441,98	26.532,99	18.574,27	36.371,08	37.295,62	28.443,19
Kota Pdg Panjang	13.457,51	22.581,30	23.782,09	30.460,80	32.420,61	20.259,69
Kota Bukittinggi	33.828,54	38.891,93	27.476,17	42.286,42	45.076,56	37.511,93
Kota Payakumbuh	31.491,01	32.555,38	33.847,17	44.561,14	50.708,91	38.632,72
Kota Pariaman	13.341,78	12.263,18	36.640,76	17.048,30	17.578,73	19.374,55
Rata-rata	26.829,67	28.181,13	27.723,35	37.609,76	42.679,20	32.604,62

Sumber : BPS, Statistik Keuangan Pemerintah Kab/Kota Sumatera Barat 2008 2012

Masalah mengenai seberapa berperannya DAU dalam era desentralisasi fiskal dapat meningkatkan rasio penduduk produktif, IPM, rasio belanja pegawai dan PAD serta mengurangi kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dalam otonomi daerah. Dimana bila rasio penduduk produktif, dapat meningkatkan transfer pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan khususnya DAU. Dalam meningkatkan kesejahteraan kualitas pembangunan manusia diikuti dengan peningkatkan DAU dapat meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik. Pemanfaatan DAU yang maksimal dalam pemerataan keuangan suatu daerah dapat mempengaruhi juga rasio belanja pegawai untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia daerah tersebut. Dalam era otonomi daerah, PAD diharapkan sebagai tolak ukur

keberhasilan keuangan daerah karena bersumber asli dari daerah seperti pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Berdasarkan masalah dan fenomena latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk menelaah lebih jauh tentang Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat melalui penelitian yang berjudul: **“Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Dana Alokasi Umum (DAU) di Kabupaten / Kota di Sumatera Barat”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Sejauhmana pengaruh Rasio Beban Ketergantungan Hidup terhadap Dana Alokasi Umum Kab/Kota Di Sumatera Barat?
2. Sejauhmana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Dana Alokasi Umum Kab/Kota Di Sumatera Barat?
3. Sejauhmana pengaruh Rasio Belanja Pegawai terhadap Dana Alokasi Umum Kab/Kota Di Sumatera Barat?
4. Sejauhmana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Dana Alokasi Umum Kab/Kota Di Sumatera Barat?
5. Sejauhmana secara bersama-sama pengaruh Rasio Beban Ketergantungan, IPM, Rasio Belanja Pegawai, dan PAD terhadap Dana Alokasi Umum Kab/Kota Di Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk melihat:

1. Pengaruh Rasio Beban Ketergantungan Hidup Terhadap Dana Alokasi Umum Kab/Kota Di Sumatera Barat.
2. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Dana Alokasi Umum Kab/Kota Di Sumatera Barat.
3. Pengaruh Rasio Belanja Pegawai Terhadap Dana Alokasi Umum Kab/Kota Di Sumatera Barat.
4. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Dana Alokasi Umum Kab/Kota Di Sumatera Barat.
5. Pengaruh secara bersama-sama Rasio Beban Ketergantungan, IPM, Rasio Belanja Pegawai, dan PAD, terhadap Dana Alokasi Umum Kab/Kota Di Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berharap hasil penelitian yang didapatkan bermanfaat bagi berbagai pihak sebagai berikut :

1. Bagi penulis

Sebagai salah satu syarat akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

2. Bagi pengambil kebijakan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang berguna dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi dana alokasi umum sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang perlu dipacu untuk mengatasi masalah *fiscal gap*.

3. Ilmu Pengetahuan

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan menambah khasanah ilmu ekonomi khususnya ekonomi pembangunan. Manfaat khusus bagi ilmu pengetahuan yakni dapat melengkapi kajian mengenai dana alokasi umum dengan mengungkap secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhinya.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Konsep Intergovernmental Grants

Hubungan keuangan antar pemerintah (*intergovernmental fiscal relations*) menyangkut pembagian tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu antara tingkat pemerintahan dan pembagian sumber penerimaan untuk menutupi pengeluaran akibat kegiatan-kegiatan itu. Tujuan utama hubungan pusat dan daerah untuk mencapai perimbangan antara pembagian potensi dan sumber daya dapat sesuai dengan peranan yang dimainkan oleh pemerintah daerah. Untuk menentukan besarnya ketersediaan dana antar pemerintah daerah digunakan prinsip kebutuhan daerah melalui pembagian fungsi-fungsi (urusan-urusan) yang direfleksikan dalam kebijaksanaan otonomi daerah, yang didalamnya mengatur mengenai pembagian kewenangan sekaligus pembiayaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Devas et.al. 1989:179).

Transfer dana dari Pemerintah Pusat kepada Daerah (*intergovernmental fiscal transfer*) merupakan satu dari beberapa pilar pokok desentralisasi fiskal, selain pembagian kewenangan (*expenditure assignment*), pembagian sumber pendapatan (*revenue assignment*), dan pinjaman Daerah. Dalam konteks Indonesia dewasa ini, transfer dana dari Pemerintah Pusat ke Daerah tersebut adalah dalam wujud Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DAU merupakan transfer dana yang bersifat umum

(*block grant*), sementara DAK merupakan transfer dana yang bersifat spesifik, yaitu untuk tujuan-tujuan tertentu yang sudah ditentukan (*specific grant*). Dengan demikian, transfer dana dimaksud tidak termasuk bagi hasil (*revenue sharing*) antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Handriyanto Setiadi : 2007).

Menurut Kurniawan Andreas dkk (2012) Era desentralisasi membawa banyak konsekuensi bagi Indonesia. Semua keputusan, baik politik, ekonomi, yang tadinya diambil oleh pemerintah pusat, dialihkan kepada pemerintah daerah. Dalam proses desentralisasi tersebut, tentu memerlukan pendanaan. Desain penerimaan yang sebelumnya dikuasai oleh negara, sekarang perlu didesentralisasikan ke daerah juga. Namun permasalahannya adalah bagaimana membuat desain pembagian penerimaan ke daerah? Kita tentu tidak dapat menyamaratakan pembagian penerimaan itu ke semua daerah. Kita harus menyesuaikan dengan keadaan dan kemampuan masing-masing daerah. Oleh karena itulah terbentuk konsep dana perimbangan. Dana perimbangan adalah suatu konsep pembagian penerimaan ke daerah oleh pemerintah pusat (*Intergovernmental Transfer*) selain Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut.

Pada dasarnya ada dua jenis mekanisme transfer dana dari pemerintah pusat kepada daerah pemerintah daerah, yaitu *conditional* dan *unconditional grants*, kadang-kadang disebut *specific purpose grants* atau *categorical grants*. Dalam hal ini, pemerintah pusat menetapkan tujuan penggunaan dana yang diberikan kepada pemerintah daerah. *Grants*, seperti ini sering kali digunakan untuk mengatasi masalah yang sangat penting untuk pemerintah

pusat, tetapi dianggap kurang begitu penting oleh pemerintah daerah. Contohnya adalah proyek dengan *inter-regional spill-over effects*, misalnya jalan antar daerah. Ada beberapa jenis *conditional grants*, yaitu:

1. *Matching Open-Ended Grants*.
2. *Matching Closed-Ended Grants*.
3. *Non-matching Grants*.

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

a. Pengertian Dana Alokasi Umum

Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang sangat baik. Implementasi kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah melalui dana perimbangan ditujukan untuk mengurangi ketidakmampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pengeluarannya dari pajak dan retribusi dan dengan melihat kenyataan bahwa kebutuhan daerah sangat bervariasi (Widjaja, 2002 : 129).

Klasifikasi Dana Perimbangan Menurut Undang-Undang Nomor 25/1999 dalam Mardiasmo (2004:97), dana perimbangan dari pemerintah pusat terdiri dari bagian daerah dan penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam, DAU dan DAK. Dari ketiga alokasi dana tersebut DAU

merupakan alokasi terbesar. Klasifikasi dana perimbangan berdasarkan Permendagri 13/2006, terdiri atas :

Dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Jenis dana bagi hasil dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak. Jenis dana alokasi umum hanya terdiri atas pendapatan dana alokasi umum. Jenis dana alokasi khusus dirinci menurut objek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Hal penting lain dari pengaturan keuangan menurut UU No.25 / 1999 adalah provinsi berupa transfer antar pemerintah dari pusat ke kabupaten dan kota yang disebut dengan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Diperkenalkannya DAU dan DAK berarti menghapus Subsidi Daerah Otonom dan dana Inpres yang diperkenalkan pada era Soeharto.

Dana Alokasi Umum merupakan *block grant* yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya, dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak daripada daerah kaya. Dengan kata lain, tujuan penting alokasi DAU adalah dalam kerangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik antar pemda di Indonesia. UU No.25 / 1999 pasal 7 menggariskan bahwa pemerintah pusat berkewajiban menyalurkan paling sedikit 25% dari Penerimaan Dalam Negerinya dalam bentuk DAU (Kuncoro, 2004). Konsep dasar formulasi DAU sebagaimana yang

diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 1999 itu secara implisit merupakan penjabaran dari teori *governmental transfer* yang berbasis pada konsepsi *fiscal gap*.

Menurut Ujang Bahar (2009 : 152) berdasarkan Pasal 1 poin 21 UU No. 33 Tahun 2004 DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kata “Umum” dalam DAU mengandung pengertian DAU merupakan *block Grant* artinya kewenangan pengaturan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah sesuai tujuan pemberian otonomi daerah. DAU diberikan kepada seluruh daerah otonom di Indonesia.

Menurut Mahmud Sidik dalam Mudrajad Kuncoro memberikan defenisi DAU sebagai :

1. Salah satu komponen dari dana perimbangan pada APBN yang pengalokasiannya didasarkan atas konsep kesenjangan fiskal atau celah fiskal (*fiscal gap*).
2. Instrument untuk mengatasi *horizontal imbalance*, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dimana penggunaannya ditetapkan sepenuhnya oleh daerah.
3. *Equalization grant* berfungsi untuk menetralisasi ketimpangan kemampuan keuangan dengan adanya PAD. Bagi hasil pajak dan bagi hasil SDA yang diperoleh daerah.

b. Tujuan Dana Alokasi Umum

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 104 tahun 2000, Mardiasmo (2002:157) mengungkapkan bahwa “Tujuan DAU adalah untuk *horizontal equity* dan *sufficiency*. Tujuan *horizontal equity* merupakan kepentingan pemerintah pusat dalam rangka melakukan distribusi pendapatan secara adil dan merata agar tidak terjadi kesenjangan yang lebar antar daerah. Sementara itu yang menjadi kepentingan daerah adalah kecukupan (*sufficiency*), terutama adalah untuk menutup *fiscal gap*”. *Fiscal gap* terjadi karena karakteristik daerah di Indonesia sangat beraneka ragam. Ada daerah yang dianugerahi kekayaan alam yang sangat berlimpah. Ada juga daerah yang sebenarnya tidak memiliki kekayaan alam yang besar namun karena struktur perekonomian mereka telah tertata dengan baik maka, potensi pajak dapat dioptimalkan sehingga kekayaan tersebut menjadi kaya. Namun, banyak juga daerah yang secara alamiah maupun struktur ekonomi masih sangat tertinggal. Untuk itulah maka, transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk DAU masih diberikan untuk mengatasi kesenjangan antar daerah (*fiscal gap*).

Dana Alokasi Umum dapat ditentukan oleh (Kuncoro : 2004) :

$$\mathbf{DAU_i} = \mathbf{AM} + \mathbf{KF}$$

$$\mathbf{AM} = \mathbf{LS} + \alpha \mathbf{Gaji}$$

$$\mathbf{KF_i} = \mathbf{BD_i} \times \mathbf{DAU_n}$$

$$\mathbf{BD_i} = \frac{(\mathbf{KbF} - \mathbf{KpF})\mathbf{i}}{(\mathbf{KbF} - \mathbf{KpF})\mathbf{n}}$$

Keterangan :

DAU_i : Dana Alokasi Umum Provinsi atau Kabupaten/Kota

DAU_n : Dana Alokasi Umum Seluruh Provinsi atau Kabupaten/Kota

AM : Alokasi Minimum

KF : Kesenjangan Fiskal

BD : Bobot Daerah

LS : Lumpsum

α Gaji : Proposional berdasarkan kebutuhan gaji

KbF : Kebutuhan Fiskal dari Provinsi atau Kabupaten/Kota

KpF : Kapasitas Fiskal Provinsi atau Kabupaten/Kota

Menurut Ujang Bahar (2009 : 153) faktor-faktor yang mempengaruhi dana alokasi umum berdasarkan UU No.33 Tahun 2004 DAU ditetapkan sekurang kurangnya 26% dari PDN netto yang ditetapkan dalam APBN. Untuk mengalokasikan DAU yang jumlahnya cukup besar dipergunakan suatu formula yang rumusan serta variabel-variabelnya didasarkan atas perkiraan kebutuhan dan potensi ekonomi daerah yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan konsep kebutuhan fiskal (*fiscal need*) dan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) dimana daerah-daerah yang memiliki kapasitas lebih besar dibandingkann dengan kebutuhan fiskalnya seyogyanya menerima DAU yang relatif tidak terlalu besar. Daerah-daerah yang memiliki kebutuhan fiskal lebih besar dari kapasitas fiskalnya, seyogyanya menerima DAU yang relatif lebih besar, agar dapat menyediakan pelayanan dasar yang cukup memadai.

Berdasarkan UU No.33 Tahun 2004 alokasi DAU sampai tahun 2007 ditetapkan sekurang-kurangnya 25,5% dari PDN neto dan mulai tahun 2008 sekurang-kurangnya 26% dari PDN Neto. Kebutuhan fiskal (*fiscal need*) sampai tahun anggaran 2005 ditentukan oleh :

1. Jumlah penduduk
2. Luas wilayah
3. Keadaan geografis

Variabelnya terdiri dari :

1. Indeks jumlah penduduk
2. Indeks luas wilayah
3. Indeks poverty gap, dan
4. Indeks harga

Kapasitas fiskalnya (*fiscal capacity*) ditentukan oleh :

1. PDRB Jasa
2. Bagi hasil

Mulai tahun 2006 kebutuhan fiskal (*fiscal need*) ditentukan oleh :

1. Jumlah penduduk
2. Luas wilayah
3. Kelemahan konstruksi (*poverty gap*)
4. Indeks pembangunan manusia (IPM)

Alokasi DAU kepada masing-masing daerah didasarkan atas kesenjangan fiskal yang dihitung berdasarkan perkalian dari pagu DAU seluruh daerah (provinsi atau kabupaten/kota) dengan bobot daerah yang

bersangkutan. Dalam hal ini bobot suatu daerah merupakan proporsi kebutuhan DAU suatu daerah terhadap total kebutuhan DAU seluruh daerah. Dengan demikian besarnya alokasi DAU kepada suatu provinsi dihitung dengan mengalikan bobot provinsi bersangkutan dengan besarnya total DAU yang tersedia untuk provinsi, yaitu 10% dari angka DAU nasional. Atau dengan rumus :

$$\text{Alokasi DAU provinsi} = \text{Bobot provinsi} \times 10\% \times \text{DAU Nasional}$$

Sedang besarnya alokasi DAU ke suatu Kabupaten/Kota dihitung dengan mengalikan bobot Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan besarnya total DAU yang tersedia untuk kabupaten/kota yaitu 90% dari angka DAU secara nasional. Atau dengan rumus :

$$\text{Alokasi DAU Kab/Kota} = \text{Bobot kab/kota} \times 90\% \times \text{DAU Nasional}$$

Alokasi dasar DAU yang ideal dilakukan hanya berdasarkan konsep kesenjangan fiskal saja ternyata belum dapat dipenuhi. Nuansa politis dalam rangka membangun formula DAU ternyata masih relatif dominan dengan diperhitungkannya besaran alokasi dasar (AD) sebagai salah satu komponen DAU. AD merupakan jumlah gaji seluruh pegawai negeri sipil daerah (PNSD) yang terdiri dari gaji pokok ditambah tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan penggajian PNS. Dengan demikian formula DAU berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 adalah sebagai berikut :

$$\text{DAU} = \text{AD} + \text{Celah Fiskal (CF)}$$

$$\text{AD} = \text{Alokasi Dasar}$$

$$\text{CF} = \text{Kebutuhan Fiskal (KbF)} - \text{Kapasitas Fiskal (KpF)}$$

Dimana DAU = Dana Alokasi Umum

AD = Gaji PNSD

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa perhitungan alokasi DAU untuk masing-masing daerah sangat tergantung pada kondisi di masing-masing daerah yang dicerminkan oleh data masing-masing variabel (Ujang Bahar, 2009 : 155).

3. Pengaruh Rasio Beban Ketergantungan Hidup Terhadap Dana Alokasi Umum

Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia Rasio ketergantungan hidup (dependency ratio) yaitu angka perbandingan yang menunjukkan besar beban tanggungan dari kelompok usia produktif. Usia produktif (15-64 tahun) selain menanggung kebutuhan hidup dirinya juga menanggung kebutuhan hidup golongan usia muda (0 – 14 tahun) dan golongan tua (65 tahun ke atas).

Jumlah penduduk yang besar bagi Indonesia oleh para perencana pembangunan dipandang sebagai asset modal dasar pembangunan tetapi sekaligus juga sebagai beban pembangunan. Sebagai asset apabila dapat meningkatkan kualitas maupun keahlian atau ketrampilannya sehingga akan meningkatkan produksi nasional. Rasio ketergantungan yang besar akan menjadi beban jika struktur, persebaran dan mutunya sedemikian rupa sehingga hanya menuntut pelayanan sosial dan tingkat produksinya rendah sehingga menjadi tanggungan penduduk yang bekerja secara efektif (Agus Widarjono, 1999 dalam Ari Budihardjo, 2003).

Adam Smith berpendapat bahwa dengan didukung bukti empiris bahwa pertumbuhan penduduk tinggi akan dapat menaikkan output melalui penambahan tingkat dan ekspansi pasar baik pasar dalam negeri maupun luar negeri. Penambahan penduduk tinggi yang diiringi dengan perubahan teknologi akan mendorong tabungan dan juga penggunaan skala ekonomi di dalam produksi. Penambahan penduduk merupakan satu hal yang dibutuhkan dan bukan suatu masalah, melainkan sebagai unsur penting yang dapat memacu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Besarnya pendapatan dapat mempengaruhi penduduk. Jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang dapat ditarik juga meningkat.

Menurut Irawan dan Suparmoko dalam *Ekonomika Pembangunan* (2002 : 83) Salah satu perintang pembangunan ekonomi di negara-negara yang sedang berkembang dan yang sekaligus merupakan ciri negara-negara tersebut ialah adanya ledakan penduduk (*population explosion* dan *population pressure*). Tujuan pembangunan ekonomi adalah peningkatan standar hidup penduduk negara yang bersangkutan, yang biasa diukur dengan kenaikan pendapatan riil per kapita. Pendapatan riil perkapita adalah sama dengan pendapatan nasional riil atau output secara keseluruhan yang dihasilkan selama satu tahun dibagi dengan jumlah penduduk seluruhnya. Jadi standar hidup tidak akan dapat dinaikkan kecuali jika output total meningkat dengan lebih cepat daripada pertumbuhan jumlah penduduk. Untuk mempengaruhi perkembangan output total diperlukan penambahan investasi yang cukup besar agar

supaya dapat menyerap pertumbuhan penduduk; yang berarti naiknya pendapatan riil per kapita.

Oleh karena itu sebenarnya terdapat perpacuan antara perkembangan pendapatan nasional riil (output total) dengan perkembangan penduduk, dimana dapat dilihat bahwa arti pentingnya perkembangan penduduk adalah mengenai pengaruhnya terhadap standar hidup penduduk itu sendiri, terutama dalam hubungannya dengan persediaan bahan makanan dan sumber-sumber riil yang ada; yang semuanya ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup penduduk. Sebaliknya perkembangan ekonomi dapat pula mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk.

Kalau seandainya penurunan jumlah penduduk, maka akan terjadi pula penurunan rangsangan untuk mengadakan investasi dan permintaan agregatif juga akan turun. Jika perkembangan penduduk tertunda maka akumulasi kapital juga akan menjadi lesu karena beberapa alasan, yaitu wiraswasta akan mengira bahwa pasar akan menjadi sempit.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Rasio Penduduk Produktif Terhadap Non Produktif merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan layanan publik disetiap daerah, setiap penurunan rasio ketergantungan, maka akan terjadi penambahan pada dana alokasi umum.

4. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Dana Alokasi Umum (DAU).

Setiap daerah mempunyai kemampuan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya. Hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara daerah satu dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan fiskal ini pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintah (UU No.32/2004). Dengan demikian terjadi transfer dan yang cukup signifikan dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan pemerintah daerah mampu meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain (Darwanto dan Yustikasari, 2007). Menurut Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa dalam era otonomi, pemerintah daerah harus semakin mendekati diri pada berbagai pelayanan masyarakat. Oleh karena itu penggunaan dana ini diharapkan untuk keperluan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat yang merupakan tuntutan dari otonomi daerah. Jika kondisi masyarakat menjadi lebih baik maka pembangunan manusia akan meningkat pula.

Menurut Fajrillah dalam Penelitiannya tentang Analisis Faktor-faktor yang Menjelaskan Dana Alokasi Umum, menunjukkan bahwa IPM suatu Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Utara meningkat, maka akan menambah penerimaan DAU juga. Menurut Dikko Alrakhman Makruf

(Public Administration 2009, University Of Indonesia) DAU diharapkan menjadi sebuah modal dalam rangka menciptakan pemanfaatan yang lebih baik. Sebagai contoh, jika dana dialokasikan untuk kepentingan pembangunan, misalnya infrastruktur atau layanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan sebagainya).

Jadi dapat disimpulkan bahwa suatu daerah yang sudah maju karena IPM yang tinggi justru akan mendapatkan DAU yang besar. Namun daerah yang kurang maju atau tertinggal karena IPM yang masih rendah justru akan mendapat DAU yang kecil. Akibatnya daerah yang tertinggal justru semakin susah mengejar ketertinggalannya terhadap daerah yang sudah maju. Akselerasi kemajuannya pun akan makin ketinggalan. Padahal tujuan semula dari DAU adalah sebagai instrument pemerataan antar daerah.

5. Pengaruh Rasio Belanja Pegawai Terhadap Dana Alokasi Umum

Pendapatan daerah yang diperoleh baik dari pendapatan asli daerah maupun dana perimbangan tentunya digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah. Menurut UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam literatur ekonomi dan keuangan daerah, hubungan pendapatan dan belanja daerah didiskusikan secara luas sejak akhir dekade 1950-an dan berbagai hipotesis tentang hubungan tersebut diuji secara empiris (Chang & Ho, 2002). Sebagian studi

menyatakan bahwa pendapatan mempengaruhi belanja, sementara sebagian lainnya menyatakan bahwa belanjalah yang mempengaruhi pendapatan (Aziz, 2000).

Menurut Dikko Alrahman Makruf (Public Administration 2009, University Of Indonesia) Pemanfaatan DAU yang dominan untuk belanja pegawai negeri sipil daerah dapat berdampak pada berkurangnya alokasi belanja modal, berkurangnya alokasi dana untuk penciptaan lapangan pekerjaan, ataupun berkurangnya alokasi dana untuk program penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu, sebaiknya pemanfaatan DAU dibuat seimbang dengan belanja lainnya atau mengkaji kembali alokasi yang sangat penting bagi daerah, namun tidak pula melupakan belanja pegawai/penggajian pegawai sebagai suatu keharusan daerah untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia.

Rasio Belanja Pegawai digunakan untuk mengetahui proporsi Belanja Pegawai terhadap total Belanja Daerah. Semakin tinggi angka rasionya maka semakin besar proporsi APBD yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil angka rasio Belanja Pegawai maka semakin kecil proporsi APBD yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai APBD.

6. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Dana Alokasi Umum

PAD dan DAU merupakan sumber pendapatan daerah yang memiliki peran utama dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka mencapai tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah yang ingin

meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah (Mardiasmo, 2002:46). Kedua sumber pendapatan daerah ini memang sulit untuk dipisahkan. Pemerintah daerah belum mampu mengandalkan PAD-nya sendiri untuk membiayai desentralisasi. Begitu pun dengan pemerintah pusat yang tidak mau sepenuhnya memberikan DAU karena akan menambah ketergantungan daerah kepada pusat.

Pada kenyataannya peningkatan PAD tidak selalu diikuti dengan peningkatan DAU, melihat bahwa penentuan DAU ikut ditentukan pula oleh besarnya PAD (PP No 55 tahun 2005 tentang dana perimbangan). Pemda terus meningkatkan PAD dibandingkan dengan DAU, sebab PAD merupakan tolak ukur kemandirian daerah. Salah satu cara meningkatkan PAD dapat dilakukan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Dengan tingginya PAD tersebut maka akan semakin mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pusat. Jadi dapat disimpulkan bahwa peningkatan PAD dapat mengakibatkan penerimaan DAU juga meningkat.

B. Penelitian Relevan

Kajian penelitian yang relevan ini merupakan bagian yang menguraikan tentang beberapa pendapat atau hasil yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Di bawah ini akan dikemukakan hasil-hasil studi yang dirasa perlu dan relevan dengan penelitian penguji.

Fhino Andrea Christy (2009) melakukan penelitian tentang Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal dan Kualitas

Pembangunan Manusia. Tujuan dari penelitian ini untuk mengenali dampak dari Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal dan Kualitas Pembangunan Manusia (yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia). Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data anggaran dan realisasi pendapatan daerah dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 pada Kabupaten dan Kota se-Jawa Tengah. Dan pendapatan daerah ini berupa DAU, dan pengeluaran daerah berupa belanja modal. Tahun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari tahun 2004 sampai tahun 2006. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum memiliki efek positif terhadap pengeluaran modal, hal ini berarti pemerintah daerah sangat bergantung pada pencairan dana dari pemerintah pusat, khususnya Dana Alokasi Umum untuk pengeluaran modal dan besarnya alokasi belanja akan menentukan pengalokasian dana bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari tingkat IPM.

Fajrillah (2006) dengan penelitiannya yang berjudul Analisis Faktor-faktor Yang Menjelaskan Dana Alokasi Umum Kabupaten / Kota di Sumatera Utara. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa DAU mampu dijelaskan oleh variabel bebas yaitu JP, PDRB, IPM, BP, PAD dan DBH, selebihnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak disertakan dalam model. Uji-F (Uji serempak) menunjukkan secara statistik pada $\alpha = 5\%$ bahwa seluruh variabel bebas dalam model menunjukkan pengaruhnya secara signifikan. Secara parsial (individual) menunjukkan JP, IPM, BP,

PAD berpengaruh signifikan dan positif terhadap DAU pada tingkat keyakinan 95 persen ($\alpha = 5\%$), variabel PDRB berpengaruh signifikan dan negatif terhadap DAU pada tingkat keyakinan 95% ($\alpha = 5\%$). Sedangkan variabel DBH tidak signifikan pengaruhnya terhadap DAU.

Erwin Ginting (2008) dengan penelitiannya yang berjudul Pengalokasian Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Dalam Belanja Pada Pemerintahan Kabupaten Karo. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa dana alokasi umum dengan jumlah yang sangat besar merupakan sumber dana utama bagi daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari. Sedang pendapatan asli daerah sebagai pencerminan kemampuan daerah juga berperan walaupun tidak secara keseluruhan. Dapat diambil kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan yaitu: a) Dalam sistem keuangan daerah yang diterapkan pemerintah Kabupaten Karo masih menggunakan metode single entry. b) adanya peningkatan penerimaan PAD dan DAU. c) telah efektifnya pengalokasian DAU dan PAD dalam belanja pemerintahan Kabupaten Karo.

Lia Maya (2000) dengan penelitiannya yang berjudul Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Dana Alokasi Umum Dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten di Jawa Barat dan Banten Tahun 2000. Hasil Penelitiannya menunjukkan bahwa Jumlah Penduduk, luas wilayah, jumlah penduduk miskin, jumlah kecamatan memiliki hubungan yang positif terhadap dana alokasi umum, artinya bahwa apabila terjadinya peningkatan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah penduduk miskin,

jumlah kecamatan sebesar masing-masing 1% maka akan mengakibatkan terjadinya peningkatan dana alokasi umum sebesar masing-masing 0,754%, 0,065%, 0,0002%, 0,513%. Berdasarkan hasil uji-t ternyata pada tingkat keyakinan 90% PAD terhadap DAU tidak signifikan, hal ini kemungkinan disebabkan karena PAD bukan merupakan faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan DAU.

Berdasarkan penelitian terdahulu, yang menjadi perbedaan penelitian sekarang dengan yang terdahulu adalah daerah yang diteliti berada pada Kabupaten/Kota Di provinsi Sumatera Barat dan variabel bebasnya menggunakan Rasio Beban Ketergantungan Hidup, IPM, Rasio Belanja Pegawai dan PAD dimana hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam transfer pemerintah pusat dalam bentuk Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka berpikir ini dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan, mengungkapkan persepsi keterkaitan antara variabel yang akan diteliti berdasarkan rumusan masalah. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum dengan Rasio Beban Ketergantungan Hidup, IPM, Rasio Belanja Pegawai, PAD sebagai variabel Independennya.

Dalam melakukan penelitian yang berjudul "**Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Dana Alokasi umum Kabupaten/Kota di Sumatera Barat**" dipakai beberapa variabel, yang terdiri dari satu variabel endogen yaitu Dana Alokasi Umum dan empat variabel eksogen yaitu Rasio

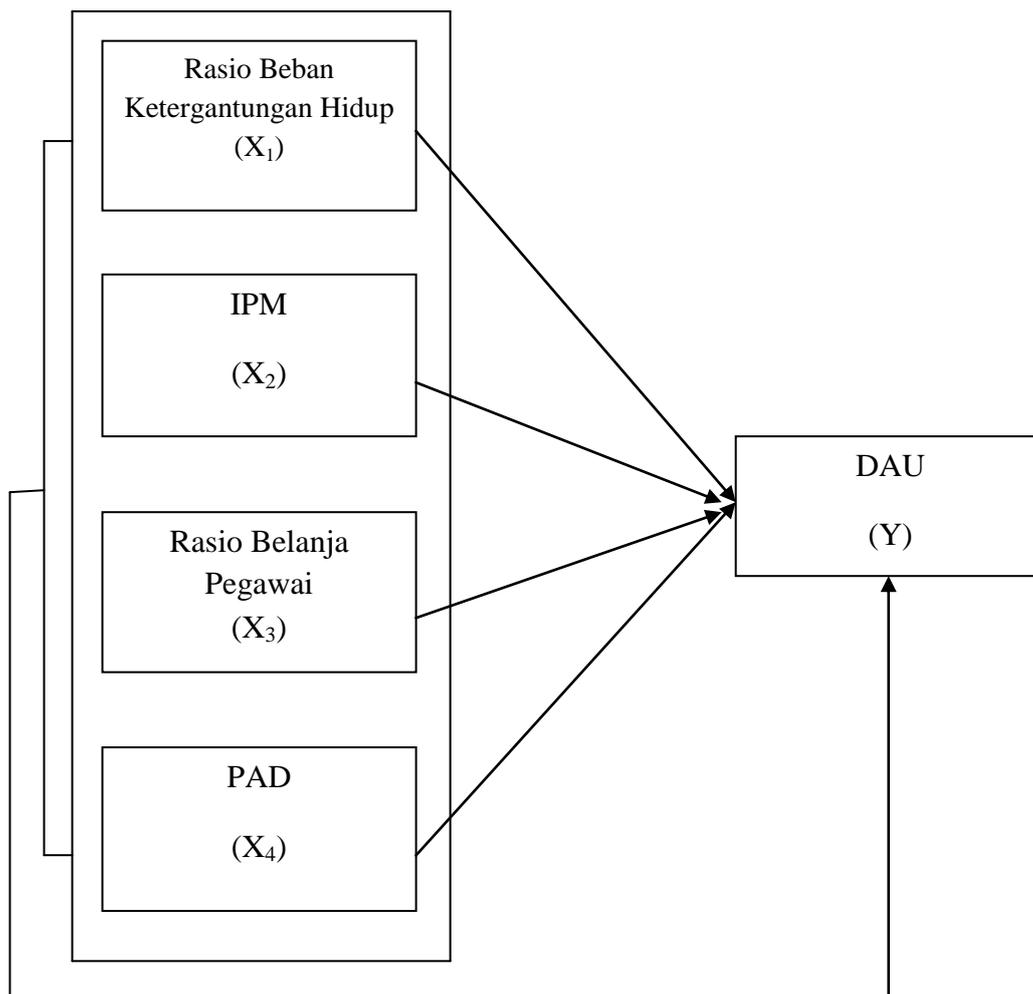
Beban Ketergantungan Hidup (X_1), Indeks Pembangunan Manusia (X_2), Rasio Belanja Pegawai (X_3) dan Pendapatan Asli Daerah (X_4).

Penelitian ini mencoba untuk melihat pengaruh variabel eksogen yaitu Rasio Beban Ketergantungan Hidup (X_1), IPM (X_2), Rasio Belanja Pegawai (X_3), dan PAD (X_4) terhadap Dana Alokasi Umum (Y).

Rasio Beban Ketergantungan Hidup berpengaruh positif terhadap dana alokasi umum. Mengindikasikan bahwa bila penduduk suatu daerah Kabupaten/Kota bertambah 1 jiwa mengakibatkan DAU daerah tersebut juga ikut bertambah. Indeks Pembangunan Manusia juga berpengaruh signifikan terhadap dana alokasi umum. Mengindikasikan bahwa bila IPM suatu daerah Kabupaten/Kota meningkat, mengakibatkan DAU juga ikut meningkat.

Rasio Belanja pegawai juga berpengaruh signifikan terhadap dana alokasi umum. Mengindikasikan bahwa bila belanja pegawai suatu daerah Kabupaten/Kota bertambah 1 (satu) juta rupiah mengakibatkan dana alokasi umum daerah tersebut juga bertambah. Pendapatan asli daerah juga berpengaruh signifikan terhadap dana alokasi umum. Kenaikan PAD akan meningkatkan dana alokasi umum berarti daerah tersebut dapat meningkatkan keuangan daerahnya sendiri, maka daerah akan semakin mandiri.

Untuk lebih jelasnya, maka dalam penelitian ini digunakan kerangka konseptualnya sebagai berikut :



Gambar 1 : kerangka konseptual analisis faktor-faktor yang mempengaruhi dana alokasi umum di Kabupaten/Kota Sumatera Barat.

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pada kerangka konseptual diatas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara Rasio Beban Ketergantungan Hidup terhadap dana alokasi umum Kab/Kota di Sumatera Barat.

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_a : \beta_1 \neq 0$$

2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara Indeks Pembangunan Manusia terhadap dana alokasi umum Kab/Kota di Sumatera Barat.

$$H_0 : \beta_2 = 0$$

$$H_a : \beta_2 \neq 0$$

3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara rasio belanja pegawai terhadap dana alokasi umum Kab/Kota di Sumatera Barat.

$$H_0: \beta_3 = 0$$

$$H_a: \beta_3 \neq 0$$

4. Terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan asli daerah terhadap dana alokasi umum Kab/Kota di Sumatera Barat.

$$H_0 : \beta_4 = 0$$

$$H_a : \beta_4 \neq 0$$

5. Secara bersama-sama terdapat pengaruh yang signifikan antar rasio beban ketergantungan hidup, indeks pembangunan manusia, rasio belanja pegawai dan pendapatan asli daerah terhadap dana alokasi umum Kab/Kota di Sumatera Barat.

$$H_0: \beta_1: \beta_2: \beta_3: \beta_4 = 0$$

$$H_a: \text{salah satu koefisien} \neq 0$$

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Rasio Beban Ketergantungan Hidup berpengaruh signifikan Terhadap Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat. Artinya, setiap perubahan yang terjadi pada rasio beban ketergantungan hidup mengakibatkan berubahnya dana alokasi umum Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Disini dapat dilihat bahwa rasio beban ketergantungan hidup meningkat, dana alokasi umum akan menurun yang mengakibatkan menurunnya transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk dana alokasi umum.
2. Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan Terhadap Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat. Artinya, setiap perubahan yang terjadi pada Indeks Pembangunan Manusia mengakibatkan berubahnya Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Disini dapat dilihat bahwa meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia, Dana Alokasi Umum juga akan meningkat karena untuk mewujudkan IPM yang tinggi dibutuhkan dana yang besar, yaitu DAU untuk meningkatkan pelayanan publik.

3. Rasio Belanja Pegawai berpengaruh signifikan Terhadap Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat. Artinya, setiap perubahan yang terjadi pada rasio belanja pegawai mengakibatkan berubahnya dana alokasi umum Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Disini dapat dilihat bahwa dana alokasi umum yang meningkat, rasio belanja pegawai juga akan meningkat. Semakin tinggi angka rasionya semakin besar proporsi APBD yang dialokasikan untuk belanja pegawai.
4. Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat. Artinya, setiap perubahan yang terjadi pada dana alokasi umum tidak mengakibatkan berubahnya pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Disini dapat dilihat bahwa pendatan asli daerah yang tinggi setiap tahunnya belum tentu menjamin tingginya dana alokasi umum yang ada.
5. Secara bersama-sama rasio beban ketergantungan hidup, indeks pembangunan manusia, rasio belanja pegawai, dan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap dana alokasi umum di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat artinya secara bersama-sama keempat variabel bebas dalam penelitian ini dapat mempengaruhi dana alokasi umum Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

B. Saran

Bertitik tolak dari uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dan hasil hipotesis penelitian ini serta kesimpulan yang diperoleh dari hasil

analisis, maka untuk dapat meningkatkan dana alokasi umum kabupaten/kota di Sumatera Barat, maka saran penulis yaitu sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah atau pengambil kebijakan dalam hal penggunaan formula Dana Alokasi Umum (DAU) untuk dasar pembagian DAU agar memperhatikan kembali variabel-variabel yang dapat mempengaruhi DAU tersebut untuk ditelaah lebih lanjut lagi.
2. Kepada para peneliti selanjutnya agar mencari variabel-variabel yang sangat mendukung variabel yang mempengaruhi DAU agar bisa menjadi masukan bagi para penentu kebijakan pembagian DAU umumnya untuk seluruh Indonesia, khususnya propinsi Sumatera Barat.
3. Semua daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat diharapkan dapat meningkatkan penerimaan PAD yang berasal dari pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah untuk mendorong kemandirian daerah tetapi tidak menimbulkan dampak negatif terhadap dana alokasi umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Yahya Rahmana Hidayat. 2012. *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Subsidi Pangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah*. Jakarta: Jurnal Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik, Universitas Esa Unggul.
- Bahar, Ujang. (2009). *Otonomi Daerah Terhadap Pinjaman LN*. Jakarta: PT. Indeks.
- BPS. (2009-2011). *Statistik Keuangan Daerah Menurut Kabupaten / Kota Sumatera Barat*. Padang: Bps Sumatera Barat.
- Deliarnov. (2010). *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Fajrillah.2012. *Analisis Faktor-faktor yang Menjelaskan Dana Alokasi Umum(DAU) (kasus:Kabupaten & Kota di Sumatera Barat*.Jurnal Ekonomi Pembangunan. (Online), (<http://www.slideshare.net/fajrillah/jurnal-penelitianfajrillahke3stth>), diakses 11 Juni 2013).
- Ginting, Charisma Kuriata, Irsad Lubis, dan Kasyful Mahalli. 2008. *Pembangunan Manusia di Indonesia dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*. Jurnal Perencanaan & Pengembangan Wilayah, Vol.4, No.1, Agustus Wahana Hijau. Yogyakarta.
- Gujarati, Damodar. (2003). *Dasar-DasarEkonometrika*.Erlangga. Jakarta.
- . (2006). *Dasar-DasarEkonometrika*.Erlangga. Jakarta.
- Halim, Abdul. (2004). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Kintamani, Ida. (2008). *Analisis Indeks Pembangunan Manusia*. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, No. 72, Mei Pusat Data dan Informasi Pendidikan Balitbang. Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- .(2006). *Ekonomi Pembangunan Teori, MasalahdanKebijakan*. STIM YKPN. Yogyakarta.